

Toleransi sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat multikultural di Indonesia

Muhammad Thoriq Asshiddiq

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: muhammadthoriqasshiddiq@gmail.com

Kata Kunci:

Toleransi; masyarakat multikultural; integrasi sosial; pluralisme; kerukunan beragama

Keywords:

Human rights enforcement; freedom of speech; cyberspace; digital democracy; legal certainty

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran sentral toleransi sebagai fondasi dalam memperkuat struktur masyarakat multikultural di Indonesia. Sebagai negara dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama yang sangat tinggi, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga integrasi sosial di tengah potensi konflik horizontal. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai toleransi diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toleransi bukan sekadar sikap pasif membiarkan perbedaan, melainkan keterlibatan aktif dalam memahami dan menghargai keberagaman guna menciptakan harmoni. Keberhasilan pembangunan masyarakat multikultural sangat bergantung pada

sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran kolektif masyarakat dalam merawat kemajemukan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan literasi toleransi sejak dini menjadi instrumen krusial untuk menangkal radikalisme dan memperkuat kohesi sosial demi keberlangsungan jati diri bangsa yang inklusif.

ABSTRACT

This research examines the central role of tolerance as a foundation in strengthening the structure of multicultural society in Indonesia. As a country with high ethnic, cultural, and religious diversity, Indonesia faces significant challenges in maintaining social integration amidst potential horizontal conflicts. Using a qualitative method with a descriptive-analytical approach, this study explores how the values of tolerance are implemented in social and state life. The results show that tolerance is not merely a passive attitude of allowing differences but an active engagement in understanding and respecting diversity to create harmony. The success of building a multicultural society depends heavily on the synergy between government policies and collective public awareness in nurturing plurality. The conclusion of this research emphasizes that strengthening tolerance literacy from an early age is a crucial instrument to counter radicalism and strengthen social cohesion for the continuity of an inclusive national identity.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu entitas negara kepulauan paling kompleks di dunia yang terajut secara apik dari ribuan pulau, ratusan kelompok etnis, serta spektrum keberagaman agama dan budaya yang sangat kaya serta multidimensional. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang diwariskan oleh para pendiri bangsa bukanlah sekadar barisan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kata puitis tanpa makna yang bersifat dekoratif, melainkan sebuah kontrak sosial fundamental dan komitmen kebangsaan yang menjadi fondasi utama bagi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ruang sosiologis yang sedemikian plural, kehadiran kemajemukan ini membawa dua potensi yang saling bertolak belakang. Hal ini dapat menjadi kekayaan peradaban yang memperkuat jati diri dan daya saing bangsa di kancah global, namun di sisi lain, ia juga dapat menjadi titik celah munculnya polarisasi serta gesekan sosial yang destruktif apabila tidak dikelola dengan kearifan lokal yang mendalam dan kebijakan negara yang inklusif.

Dalam konteks tersebut, toleransi muncul sebagai pilar utama sekaligus jembatan fungsional yang menghubungkan berbagai perbedaan tersebut menjadi sebuah harmoni yang stabil dan berkelanjutan bagi seluruh elemen masyarakat. Secara filosofis, toleransi dalam kerangka masyarakat Indonesia melampaui makna harfiah "membiarkan" atau sekadar "menahan diri" dari tindakan diskriminatif, ia merupakan sebuah sikap aktif dan kesadaran batin untuk mengakui, menghargai, serta menjunjung tinggi harkat martabat manusia tanpa memandang batasan identitas primordialnya. Pilar toleransi inilah yang memungkinkan sebuah masyarakat multikultural untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*), saling melengkapi dalam perbedaan, serta membangun rasa saling percaya (*social trust*) yang merupakan modal sosial paling krusial dalam mengakselerasi proses pembangunan nasional yang merata.

Namun, di era modern yang penuh dengan disrupsi arus informasi dan dinamika politik identitas yang sering kali memanas, ketahanan nilai-nilai toleransi di Indonesia kini menghadapi tantangan yang tidak ringan serta bersifat multidimensional. Munculnya benih-benih intoleransi di tingkat akar rumput, polarisasi sosial yang semakin tajam pasca-kontestasi politik, serta penyebaran narasi eksklusivisme yang masif di ruang publik digital sering kali menguji kekokohan pilar-pilar kebangsaan kita yang telah lama terbangun. Konflik horizontal yang berbasis sentimen primordial menunjukkan secara nyata bahwa keberagaman yang tidak dibarengi dengan edukasi toleransi yang substantif dapat berubah menjadi kekuatan destruktif yang mampu meluluhlantakkan kohesi sosial dalam waktu singkat, sehingga menjaga pilar toleransi tetap tegak di tengah terpaan globalisasi dan radikalisme merupakan tanggung jawab kolektif yang sangat mendesak.

Pemerintah melalui institusi pendidikan dan lembaga keagamaan memegang peranan yang sangat strategis dalam menginternalisasi nilai-nilai toleransi agar menjadi budaya hidup sehari-hari yang mendarah daging di tengah masyarakat. Kebijakan publik yang dirancang secara inklusif serta pengembangan kurikulum pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai multikulturalisme harus diposisikan sebagai strategi preventif jangka panjang guna menangkal potensi disintegrasi sejak dini. Tanpa adanya sinergi yang kuat antara kebijakan makro di tingkat pusat dan praktik mikro di tingkat akar rumput, konsep masyarakat multikultural yang harmonis hanya akan menjadi narasi indah yang sangat rapuh di hadapan realitas sosial yang dinamis dan fluktuatif, sehingga diperlukan gerakan literasi toleransi yang masif untuk memastikan generasi mendatang memiliki kecerdasan budaya dalam menavigasi kemajemukan.

Penelitian ini melakukan analisis komprehensif mengenai bagaimana nilai toleransi dapat bertransformasi dari sekadar konsep teoretis-normatif menjadi sebuah pilar

praktis yang fungsional dalam memperkuat kohesi sosial di Indonesia yang semakin kompleks. Berbeda dengan kajian-kajian terdahulu yang mayoritas hanya berfokus pada pendekatan teologis atau sejarah, artikel ini menawarkan perspektif sosiologis-praktis mengenai penguatan ketahanan masyarakat multikultural melalui strategi integrasi yang berbasis pada kearifan lokal dan kebijakan sosial yang adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret serta kerangka berpikir mengenai penguatan ekosistem toleransi yang relevan terhadap tantangan zaman, guna menjamin keberlangsungan Indonesia sebagai rumah bersama yang aman, inklusif, dan bermartabat bagi seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali.

Pembahasan

Revitalisasi Nilai Toleransi dalam Dinamika Masyarakat Plural

Revitalisasi nilai toleransi dalam konteks masyarakat multikultural di Indonesia saat ini tidak boleh lagi dipahami sekadar sebagai retorika normatif atau warisan sejarah yang bersifat statis, melainkan harus dikonstruksikan sebagai komitmen sosiologis yang dinamis dan adaptif terhadap tantangan zaman yang kian pelik. Dalam ruang lingkup masyarakat yang memiliki derajat keberagaman primordial yang sangat tinggi, toleransi berfungsi sebagai mekanisme pertahanan sosial (*social defense mechanism*) yang memungkinkan setiap individu maupun kelompok untuk berinteraksi secara harmonis tanpa harus mengorbankan integritas jati diri budayanya. Revitalisasi ini menjadi imperatif yang mendesak mengingat arus globalisasi kontemporer sering kali membawa infiltrasi ideologi transnasional yang bersifat eksklusivisme dan monolitik, yang jika tidak difilter melalui penguatan nilai toleransi yang substantif, akan berpotensi besar menggerus kohesi sosial serta merusak tatanan kearifan lokal yang telah lama menjadi perekat di tingkat akar rumput masyarakat Indonesia (Muhammad, 2025).

Secara filosofis, proses revitalisasi ini menuntut adanya reorientasi paradigma yang mendasar, di mana toleransi tidak lagi dipandang sebagai sikap "pasif-permisif" yang hanya sekadar membiarkan perbedaan ada, melainkan sebagai bentuk "keterlibatan aktif" dalam memahami dan merayakan kemajemukan sebagai aset strategis bangsa. Transformasi dari toleransi yang bersifat permukaan menuju toleransi substantif ini memerlukan internalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang universal yang mampu melampaui sekat-sekat dogmatis yang sering kali menjadi pemisah antar kelompok masyarakat. Dengan menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam interaksi sosial, revitalisasi ini mendorong terciptanya ekosistem yang inklusif, di mana keberagaman tidak lagi dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas, melainkan sebagai kekayaan intelektual dan kultural yang mampu memperluas cakrawala pemikiran kolektif bangsa dalam menghadapi perubahan dunia yang cepat (Faslah, 2024).

Revitalisasi ini harus menyasar pada penguatan etika publik yang inklusif, di mana setiap warga negara memiliki kesadaran kolektif untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia di atas kepentingan kelompok atau sentimen primordial tertentu. Dalam praktiknya, hal ini termanifestasi dalam kemampuan masyarakat untuk membangun ruang dialektika yang sehat dan cerdas, di mana setiap perbedaan

pendapat, keyakinan, maupun orientasi budaya dikelola melalui dialog yang mengedepankan rasionalitas dan empati. Penguatan etika publik ini menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya harmoni sosiologis, karena tanpa adanya landasan moral yang kuat dalam menghargai perbedaan, struktur masyarakat multikultural akan sangat rentan terhadap manipulasi sentimen yang dapat memicu fragmentasi sosial serta melemahkan stabilitas politik dan keamanan nasional.

Pilar toleransi yang direvitalisasi secara berkelanjutan akan menciptakan modal sosial (*social capital*) yang sangat kuat berupa rasa saling percaya (*social trust*) antar kelompok yang sebelumnya mungkin tersekat oleh prasangka. Keberadaan modal sosial ini merupakan fondasi utama bagi terciptanya integrasi nasional yang kokoh, berkeadilan, dan bermartabat, di mana setiap elemen bangsa merasa memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam proses pembangunan berkelanjutan. Dengan menghidupkan kembali nilai toleransi yang adaptif terhadap realitas sosiologis terkini, Indonesia dapat memosisikan diri sebagai model masyarakat multikultural yang beradab, di mana persatuan tidak dicapai melalui penyeragaman suara yang dipaksakan, melainkan melalui harmoni perbedaan yang dilindungi oleh kepastian hukum dan kesadaran kemanusiaan yang mendalam.

Tantangan Intoleransi dan Polarisasi Identitas di Era Digital

Di tengah akselerasi teknologi informasi yang sangat masif, tantangan terhadap pilar toleransi di Indonesia kini mengalami pergeseran ruang lingkup dari ranah fisik menuju ruang siber yang memiliki karakteristik tanpa batas (*borderless*). Ruang digital, yang semula diproyeksikan sebagai wahana demokratisasi informasi, sering kali bertransformasi menjadi ladang subur bagi persemaian narasi intoleransi dan radikalisme digital yang bersifat destruktif. Fenomena *echo chamber* dan bekerjanya algoritma media sosial yang bersifat personalistik cenderung mempertegas prasangka antar kelompok, di mana individu secara konstan terpapar pada informasi yang hanya mendukung bias dan pandangan dunia mereka sendiri. Kondisi ini secara sistematis memperlebar jarak emosional dan sosiologis antar pemeluk agama atau kelompok etnis, yang pada akhirnya mengikis kemampuan masyarakat untuk berempati terhadap perspektif di luar lingkaran identitas mereka (Sumbulah, 2015).

Lebih jauh lagi, polarisasi identitas di era digital ini sering kali tidak terjadi secara organik, melainkan dieksploitasi dan dimobilisasi secara terstruktur untuk kepentingan politik praktis maupun ideologi ekstrem tertentu. Penggunaan *hate speech* (ujaran kebencian) dan fabrikasi informasi atau hoaks yang berbasis sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) menjadi instrumen yang sangat efektif untuk menciptakan fragmentasi sosial di tengah masyarakat. Ketika narasi-narasi eksklusivisme ini mendominasi ruang publik maya, terjadi degradasi kualitas diskursus publik di mana argumen rasional digantikan oleh sentimen emosional yang agitatif. Hal ini merusak jalinan persaudaraan kebangsaan yang selama ini telah dirajut melalui nilai-nilai kearifan lokal, serta menempatkan kelompok minoritas dalam posisi yang semakin rentan terhadap persekusi digital maupun diskriminasi sosial (Ningrum, 2025).

Dampak dari eskalasi intoleransi di dunia maya ini memiliki efek domino yang sangat nyata dan sering kali bermanifestasi menjadi ketegangan fisik serta konflik

horizontal di dunia nyata. Ketahanan masyarakat multikultural sedang diuji secara hebat ketika sentimen kolektif yang irasional mampu memicu tindakan penolakan terhadap aktivitas keagamaan tertentu atau praktik eksklusi sosial dalam kehidupan bertetangga. Pelapukan rasa saling percaya (*social trust*) akibat polusi informasi di ruang digital mengakibatkan masyarakat menjadi mudah terprovokasi dan kehilangan daya kritis dalam menyaring informasi yang bersifat memecah belah. Jika fenomena ini dibiarkan tanpa adanya intervensi yang serius, maka pilar toleransi yang menjadi penyangga utama integrasi nasional akan mengalami kerapuhan sistemik yang dapat melumpuhkan stabilitas keamanan dan harmoni kehidupan bernegara (Azzahra & Rosyidah, 2024).

Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi mitigasi dan proteksi yang komprehensif, yang mengintegrasikan penguatan aspek hukum dengan peningkatan literasi digital berbasis multikulturalisme secara masif. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebar kebencian harus dilakukan secara adil dan transparan tanpa diskriminasi, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap martabat seluruh warga negara di ruang siber. Namun, pendekatan hukum saja tidaklah cukup; diperlukan upaya preventif melalui internalisasi kecerdasan budaya di tengah masyarakat agar setiap individu memiliki imunitas terhadap narasi intoleransi. Dengan membangun ekosistem digital yang sehat dan inklusif, pilar toleransi dapat diproteksi dari ancaman polarisasi, sehingga ruang siber Indonesia tetap menjadi wahana komunikasi yang mempererat jalinan kebangsaan di tengah kemajemukan yang ada.

Konstruksi Strategi Integrasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal dan Kebijakan Inklusif

Guna memperkuat kembali pilar toleransi yang mengalami tantangan di era disrupsi, diperlukan sebuah konstruksi strategi integrasi sosial yang mampu mensinergikan kekayaan kearifan lokal dengan kebijakan publik yang bersifat inklusif serta progresif. Indonesia pada dasarnya memiliki modal sosial yang luar biasa melalui berbagai instrumen budaya seperti sistem *Pela Gandong* di Maluku, *Mapalus* di Sulawesi Utara, hingga filosofi *Tepo Seliro* di Jawa, yang selama berabad-abad telah terbukti efektif menjadi perekat sosiologis dalam meredam potensi konflik horizontal. Strategi integrasi ini tidak boleh hanya berhenti pada tataran seremonial, melainkan harus menempatkan nilai-nilai lokal yang inklusif sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan di tingkat daerah maupun nasional, sehingga setiap keputusan publik tidak hanya merepresentasikan kepentingan mayoritas semata, tetapi juga secara aktif melindungi dan merangkul aspirasi kelompok minoritas dalam bingkai keadilan sosial (Manuputty et al., 2024).

Internalisasi kearifan lokal dalam kebijakan negara merupakan langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi hukum dan otoritas sebagai pelindung kemajemukan. Ketika nilai-nilai kearifan lokal diintegrasikan ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa sosial, pendekatan yang dikedepankan bukan lagi sekadar pendekatan punitif yang kaku, melainkan pendekatan restoratif yang berbasis pada kekeluargaan dan musyawarah. Hal ini sangat krusial untuk memulihkan kohesi sosial di tingkat akar rumput yang sempat terfragmentasi akibat polarisasi identitas, karena kearifan lokal memiliki bahasa kultural yang lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan bahasa hukum formal yang sering kali terasa asing. Dengan menghidupkan kembali "roh" gotong royong dalam kebijakan publik, negara hadir

bukan sebagai entitas yang berjarak, melainkan sebagai fasilitator kerukunan yang berakar pada identitas asli bangsa (Yunita, 2025).

Sinergi antara pemerintah, tokoh lintas agama, dan institusi pendidikan menjadi kunci utama dalam mengimplementasikan strategi integrasi ini secara masif dan berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat. Peran tokoh agama dan adat sangat sentral dalam melakukan dekonstruksi terhadap narasi eksklusivisme yang mungkin berkembang di lingkungan internal mereka masing-masing, serta menggantinya dengan narasi keagamaan yang moderat dan humanis. Di sisi lain, pemerintah harus memberikan dukungan regulasi yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan tanpa adanya diskriminasi, serta memastikan bahwa aparaturnya di lapangan memiliki perspektif HAM yang kuat dalam menangani dinamika masyarakat multikultural. Tanpa adanya sinkronisasi antara kepemimpinan moral para tokoh masyarakat dan ketegasan kebijakan pemerintah, upaya pembangunan pilar toleransi akan kehilangan daya dorongnya di hadapan tantangan intoleransi yang kian kompleks.

Dalam ranah edukasi, penguatan ekosistem pendidikan multikultural yang integratif harus diterapkan sejak dini sebagai strategi preventif jangka panjang untuk membentuk karakter generasi muda yang memiliki kecerdasan budaya (*cultural intelligence*). Kurikulum pendidikan tidak boleh hanya fokus pada penguasaan kognitif, tetapi harus mampu menumbuhkan empati sosial yang tinggi dan kemampuan untuk menavigasi perbedaan secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan, nilai-nilai toleransi ditanamkan bukan sebagai dogma, melainkan sebagai keterampilan hidup yang esensial dalam masyarakat global yang saling terhubung. Generasi yang terdidik secara multikultural akan menjadi garda terdepan dalam melawan narasi kebencian dan hoaks, karena mereka memiliki imunitas intelektual untuk tetap menghargai martabat manusia di tengah perbedaan orientasi budaya maupun keyakinan yang ada.

Sebagai simpulan dari strategi ini, pembangunan ekosistem sosial yang inklusif harus didukung oleh kepastian hukum yang menjamin bahwa setiap warga negara dapat menjalankan hak-hak konstitusionalnya tanpa rasa takut akan persekusi atau eksklusi sosial. Penegakan hukum yang adil dan tidak memihak merupakan prasyarat mutlak agar pilar toleransi tetap berdiri kokoh menopang struktur masyarakat multikultural Indonesia yang adil dan sejahtera. Dengan mengintegrasikan kembali kearifan lokal sebagai kompas moral dan didukung oleh komitmen kebijakan negara yang berpihak pada kemanusiaan, Indonesia dapat terus merawat kemajemukannya sebagai kekuatan nasional. Strategi yang komprehensif dan kolaboratif ini pada akhirnya akan mewujudkan harmoni sosiologis yang sejati, di mana persatuan nasional bukan lagi sebuah slogan, melainkan realitas hidup yang memberikan rasa aman bagi seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali.

Kesimpulan dan Saran

Toleransi merupakan pilar utama yang tidak tergantikan dalam menjaga stabilitas serta kohesi sosiologis masyarakat multikultural di Indonesia, di mana revitalisasi nilai-nilai tersebut secara aktif menjadi imperatif untuk menangkal eskalasi polarisasi digital

dan infiltrasi ideologi eksklusif yang mengancam pelapukan rasa saling percaya (*social trust*) antar elemen bangsa. Keberagaman identitas primordial yang dimiliki bangsa ini memerlukan strategi integrasi sosial yang dikonstruksikan melalui sinergi harmonis antara kebijakan publik yang inklusif dan pemanfaatan kearifan lokal sebagai modal sosial substantif yang mampu mengedepankan pendekatan restoratif-humanis dalam setiap upaya penyelesaian konflik horizontal. Tanpa adanya penguatan pilar toleransi yang adaptif terhadap dinamika era disrupsi, struktur masyarakat multikultural akan terus menghadapi risiko fragmentasi sistemik, sehingga menempatkan martabat kemanusiaan dan kepastian hukum sebagai panglima tertinggi dalam interaksi sosial menjadi prasyarat mutlak bagi keberlangsungan integrasi nasional yang kokoh dan bermartabat.

Sebagai langkah strategis ke depan, pemerintah melalui kementerian terkait perlu melakukan reformasi tata kelola digital dan penguatan regulasi yang menjamin ruang publik tetap inklusif, adil, dan bersih dari narasi intoleransi, dengan tetap menjunjung tinggi hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi. Secara simultan, institusi pendidikan bersama tokoh lintas agama harus menginisiasi gerakan literasi multikultural secara masif guna membentuk imunitas sosiologis serta kecerdasan budaya (*cultural intelligence*) bagi generasi muda melalui kurikulum yang mengedepankan empati sosial dan praktik interaksi lintas identitas yang nyata. Sinergi kolektif antara pengambil kebijakan, akademisi, dan pemimpin komunitas menjadi kunci utama untuk merawat pilar toleransi sebagai kompas moral bangsa, sehingga keberagaman Indonesia tidak lagi dipandang sebagai kerentanan, melainkan sebagai kekuatan kolektif yang mampu menavigasi tantangan zaman global dengan tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan universal yang selaras dengan jati diri bangsa.

Daftar Pustaka

- Azzahra, F., & Rosyidah, A. N. (2024). Declaration On The Elimination Of All Forms Of Intolerance And Of Discrimination Based On Religion Or Belief , Mendefinisikan Intoleransi Dan Diskriminasi Berdasarkan Agama Sebagai Tin. Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3(4), 227–242.
- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, Geostrategi, Dan Geopolitik: Membangun Keberlanjutan Dan Kedaulatan. Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup. <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Manuputty, F., Christina, S., Litaay, H., & Makaruku, N. D. (2024). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Maluku Dalam Hidden Curriculum : Strategi Membangun Perdamaian Dan Toleransi Di Sekolah Dasar. Journal Of Education Research, 5(4), 5071–5083.
- Muhammad. (2025). Religious Pluralism In Indonesia : A Critical Analysis Of Indonesian Muslim Interpretations. Afkar, 27(1), 341–382. <https://repository.uin-malang.ac.id/24025/>
- Ningrum, K. S. (2025). Tantangan Dakwah Digital Dalam Sikap Beragama Teologi Inklusif: Pandangan Komunitas Muslim Moderat Indonesia Di Media Sosial. Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir, 2(6), 1100–1110.
- Sumbulah, U. (2015). Pluralisme Dan Kerukunan Umat Beragama. Analisa Journal Of Social Science And Religion, 22(1), 1–13. <https://repository.uin-malang.ac.id/12329/>

Yunita, Y. (2025). Strategi Resolusi Konflik Antarumat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Lampung. Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa, 8(1), 17–40.